

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN *STUNTING* DI KOTA TANGERANG SELATAN PROVINSI BANTEN

Emiralda Maheswari
NPP. .31.0402
Asdaf Banten
Prodi Studi Kebijakan Publik

Email: emirildaa@gmail.com

Dosen Pembimbing : Dra. Pratiwi Nurhascaryani, M.Si

ABSTRACT

Problem (GAP): Strategies to enhance stunting prevention will be more effective if specific nutrition interventions and sensitive nutrition interventions are carried out continuously. The continuity of service delivery requires collaboration in every activity implementation, from planning to monitoring, to ensure that all nutrition intervention services can be provided to the target, especially the underprivileged community. **Objective:** To understand the implementation of stunting prevention policies in South Tangerang City, Banten Province; the factors hindering the implementation of stunting prevention policies in South Tangerang City, Banten Province; and the efforts made to overcome these hindering factors in the implementation of stunting prevention policies in South Tangerang City, Banten Province. **Method:** This research uses a descriptive qualitative method with a deductive approach. The data collection methods used are primary data sources, including interviews, observations, and documentation. The data analysis techniques employed are data reduction, data presentation, and drawing conclusions using triangulation techniques. **Results/Findings:** The policies established for stunting prevention in South Tangerang are clearly articulated and aligned with existing policies. The South Tangerang Health Office has demonstrated the appropriate attitude to tackle stunting and can collaborate effectively to determine suitable policies for stunting prevention. **Conclusion:** The hindering factor in the implementation of stunting prevention policies in South Tangerang City, Banten Province, is the lack of budget, which prevents optimal policy execution. Efforts to address these hindering factors include increasing budget availability by collaborating with other stakeholders.

Keywords: Stunting, Implementation, Policy, Health

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Strategi untuk meningkatkan pencegahan *stunting* akan lebih tepat jika intervensi gizi spesifik serta intervensi gizi sensitif dilaksanakan secara berkesinambungan. Berkesinambungannya penyampaian layanan memerlukan kolaborasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan hingga pemantauan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh pelayanan intervensi gizi dapat dilaksanakan oleh sasaran terutama masyarakat yang tidak mampu. **Tujuan:** untuk mengetahui implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, dan Upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan deduktif, pengumpulan data yang digunakan ialah data primer, yang bersumber kepada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan menggunakan teknik triangulasi. **Hasil/Temuan:**

Kebijakan yang ditetapkan untuk menanggulangi *stunting* di Tangerang Selatan dituliskan dengan jelas dan ditetapkan sejalan dengan kebijakan yang ada. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mampu melaksanakan sikap yang tepat untuk menanggulangi *stunting*. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan dapat bekerja sama untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam menanggulangi *stunting*. **Kesimpulan:** Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yaitu kurangnya anggaran sehingga kebijakan belum dapat terlaksana dengan maksimal. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten adalah Meningkatkan ketersediaan anggaran dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Kata Kunci: Stunting, Implementasi, Kebijakan, Kesehatan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan diciptakan supaya bisa membentuk Peradaban serta menjaga ketertiban sosial sehingga masyarakat dapat melaksanakan kehidupan yang baik di negara Indonesia. Sesuai dengan perkembangannya konsep pemerintahan mengalami perubahan pandangan dari yang dahulu semua masalah diatasi oleh negara, dari yang pemerintahannya yang sangat kuat serta berorientasi dengan pemerintahan dan perubahan sistem pemerintahan dari yang awalnya sentralistik menuju ke desentralisasi. Pelaksanaan pemerintahan yang maksimal merupakan pandangan untuk menyusun serta mengimplementasikan kebijakan negara yang bersifat demokratis pada masa globalisasi.

Kebijakan yang diimplementasikan contohnya adalah kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan untuk mengatasi dan menanggulangi masalah *stunting*. Tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik pemerintah juga mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas, sarana, serta prasarana kesehatan. dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah daerah mempunyai sebuah tanggung jawab yakni menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat.

Pelayanan yang dilaksanakan yakni dengan membentuk rumah sakit di setiap daerah agar rumah sakit tersebut dapat digunakan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan regulasi yang ditetapkan nomor empat empat pada tahun 2009 berkaitan dengan rumah sakit dapat diketahui jika rumah sakit diharuskan untuk memberikan pelayanan dengan baik dan aman serta mempunyai mutu sehingga rumah sakit dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan maksimal dan efektif. Peran yang dibutuhkan oleh rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan yaitu jaminan mutu layanan kesehatan yang didefinisikan harus berkesinambungan dengan tujuan dan harapan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai yaitu semua masyarakat bisa menjangkau fasilitas kesehatan saat mereka memerlukan bantuan. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang memiliki karakter dan dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan kesehatan, teknologi yang berkembang, serta kehidupan sosial ekonomi di lingkungan masyarakat yang harus selalu bisa mengalami peningkatan seiring berjalannya waktu. Hal ini juga bertujuan supaya dapat menciptakan dan meningkatkan derajat kesehatan yang maksimal.

Masalah kesehatan merupakan masalah umum yang sering kali ditemukan pada masa kini. Masalah kesehatan sangat memberikan dampak yang panjang bagi kesejahteraan masyarakat. Masalah gizi bisa terjadi pada semua kelompok usia masalah gizi pada satu kelompok usia akan mempengaruhi status gizi pada periode kehidupan selanjutnya. Indonesia memiliki masalah gizi

yang sangat berat dan ditandai dengan banyaknya kasus gizi buruk pada balita. *Stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis sehingga memberikan dampak pertumbuhan yang lambat karena kekurangan asupan zat gizi dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan anak lebih pendek dari anak seusianya serta mempunyai pemikiran yang lambat (Arif et al., 2020). Salah satu masalah kesehatan yang sering kali dijumpai di lingkungan masyarakat adalah *stunting*. *Stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan disebabkan oleh kekurangan asupan zat gizi. *Stunting* juga dapat didefinisikan sebagai masalah gizi yang penting serta memberikan dampak terhadap kehidupan sosial serta ekonomi di lingkungan masyarakat. *Stunting* juga bisa terjadi sejak anak masih dalam kandungan karena Ibu kurang mengkonsumsi asupan zat gizi protein. Masalah kurang energi protein merupakan sebuah masalah utama yang bisa mempengaruhi proses perkembangan dan pertumbuhan anak. Kekurangan gizi energi serta protein Pada kurun waktu yang lama akan mengakibatkan pertumbuhan anak terhambat (Aryastami, 2017). Faktor penyebab *stunting* diantaranya pengetahuan orang tua yang minim tentang pentingnya mencukupi kebutuhan gizi anak, minimnya ketersediaan bahan makanan, dan ketidakmampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan asupan bergizi untuk anak.

Stunting dinilai sebagai masalah yang banyak diperoleh di berbagai macam negara berkembang termasuk di negara Indonesia Masalah ini dikategorikan masalah yang cukup serius. Sesuai dengan data yang diperoleh dari UNICEF ada 7,8 juta anak *stunting* serta Indonesia masuk ke urutan 5 negara dengan total anak *stunting* yang tinggi. Upaya penanggulangan serta pencegahan *stunting* memerlukan strategi yang holistik serta terintegrasi. Berdasarkan peraturan presiden nomor 42 yang disahkan pada tahun 2013 adalah sebuah strategi pada scaling up nutrition dengan mengikut sertakan beragam sektor yang harus disikapi dengan koordinasi yang maksimal pada tingkat pusat maupun daerah. Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 10 tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*. Instansi yang berperan untuk menanggulangi masalah *stunting* yaitu Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan merupakan organisasi yang ada di ruang lingkup pemerintah pada bidang kesehatan serta dipimpin oleh kepala Dinas yang mempunyai kedudukan untuk bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tanggung jawab supaya dapat menjalankan beberapa masalah daerah pada ruang lingkup kesehatan untuk menunjang keoptimalan pencapaian kesejahteraan masyarakat pada ruang lingkup kesehatan serta menjalankan tanggung jawab perbantuan sejalan dengan bidangnya (Khalik & Awarih, 2021). Pelayanan publik berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan yang luas. Pada kehidupan bernegara pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat mulai dari pelayanan pengaturan hingga berbagai macam pelayanan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat pada aspek pendidikan, aspek kesehatan serta aspek-aspek lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan No 4 Tahun 2013 tentang Sistem Kesehatan Kota pasal 5 menjelaskan jika seluruh masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sejalan dengan keperluan kesehatannya, memperoleh ganti rugi karena tenaga kesehatan lalai melaksanakan tugasnya, memperoleh lingkungan yang sehat, serta mempunyai peran untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sedangkan pada pasal 6 menegaskan jika seluruh masyarakat memiliki kewajiban untuk berkontribusi dalam melakukan

pemeliharaan serta memberikan peningkatan derajat kesehatan individu, keluarga, maupun lingkungan.

Strategi kesehatan yang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pemeliharaan, meningkatkan kondisi kesehatan, mencegah penyakit, menyembuhkan penyakit serta memulihkan kondisi kesehatan. berdasarkan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan dapat mengikutsertakan organisasi perangkat daerah yang berhubungan dengan ruang lingkup kesehatan. Strategi untuk mencegah *stunting* dibagi menjadi dua yaitu intervensi gizi yang bersifat spesifik serta intervensi gizi yang bersifat sensitif. Strategi untuk meningkatkan pencegahan *stunting* akan lebih tepat jika intervensi gizi spesifik serta intervensi gizi sensitif dilaksanakan secara berkesinambungan. Berkesinambungannya penyampaian layanan memerlukan kolaborasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan hingga pemantauan untuk memberikan jaminan bahwa seluruh pelayanan intervensi gizi dapat dilaksanakan oleh sasaran terutama masyarakat yang tidak mampu.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan oleh Implementasi Kebijakan Penanggulangan *Stunting* Oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi Wiguna, A. R., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2021) menunjukkan Tercapainya tujuan kebijakan yaitu menurunnya angka penderita *stunting* di Kabupaten Sukabumi dengan data terakhir tahun 2020 prevalensi *stunting* di Kabupaten Sukabumi sebanyak 11.352 Jiwa dari jumlah balita yang diukur dan diperiksa kesehatannya. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan *Stunting* Berbasis Nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat, Aprillia Kinanti, Rahmadani Yusran (2022) menunjukkan Pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan di Nagari Kajai Kabupaten Pasaman Barat belum optimal dilaksanakan. Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Di Kota Semarang, Frisca Windia Harera & Zainal Hidayat (2018) menunjukkan dalam pelaksanaannya masih ditemukankondisi-kondisi yang rentan terjadi kebakaran dan tidak berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah dibuat. Adapun kesesuaian prosedur pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP. Penelitian yang dilaksanakan oleh Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022) menunjukkan ukuran dan tujuan dalam melaksanakan kebijakan sudah dibuat sesuai dengan amanat peraturan nasional dan sudah dijalankan. Sumber daya manusia yang berada di tingkat bawah khususnya kader masih kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, untuk ketersediaan sumber daya anggaran sudah cukup baik. Karakteristik organisasi pelaksana, Pembagian wewenang, ketersediaan SOP, dan pelaksanaan evaluasi pengawasan sudah dijalankan, namun masih terdapat pelaksana yang tidak memiliki SOP dalam menjalankan kebijakan. Sikap para pelaksana, khususnya pada pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih kurang, masih ditemukan masyarakat yang tidak memahami dengan baik terkait pencegahan *stunting*. Komunikasi dan koordinasi masih kurang, karena masih terdapat kegiatan yang belum tepat sasaran dalam pelaksanaannya. Kondisi lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik yang berada di Kecamatan Rajeg belum sepenuhnya mendukung keberhasilan kebijakan percepatan pencegahan *stunting* terintegrasi. Penelitian yang dilaksanakan oleh Bedasari, H., Novita, F., Sambuardi, R., & Safitri, P. (2021) menunjukkan Pemerintah Kabupaten Karimun sudah membuat kebijakan berupa Peraturan Bupati untuk pencegahan dan penanganan *stunting* namun belum melibatkan Perguruan Tinggi. Pemerintah Kabupaten Karimun masih perlu menambah tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan serta melibatkan stakeholder khususnya kepada Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Karimun untuk bersinergi dalam menurunkan angka *stunting* dalam bentuk pencegahan dan penanganan *stunting*. Penelitian yang dilaksanakan oleh Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022) menunjukkan implementasi

kebijakan Dinas Kesehatan dalam penanganan stunting di Kabupaten Karawang dapat dikatakan belum optimal, dikarenakan masih terdapat program-program yang memang belum terlaksana dan kurang memberikan efek dampak langsung kepada masyarakat Kabupaten Karawang. Saran yang peneliti berikan untuk program penurunan angka stunting ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan kualitas Dinas Kesehatan dalam menangani stunting di Kabupaten Karawang yang sebelumnya sudah baik menjadi sangat baik. Penelitian yang dilaksanakan oleh Agustino, H., & Widodo, E. R. P. (2022) menunjukkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Malang terdiri dari empat bidang, yaitu: (1) Bidang Penyuluhan dan Penggerakan Keluarga Berencana Daerah (PPKBD); (2) Bidang Pengendalian Penduduk; (3) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan (4) Bidang Pelayanan Keluarga Berencana. Masing-masing dari keempat bidang ini memiliki sejumlah program kegiatan prioritas dalam mencegah stunting di Kabupaten Malang. Penelitian yang dilaksanakan oleh Maulana, I. N. H., Sholihah, Q., & Wike, W. (2022) menunjukkan di tengah pandemi COVID-19, beberapa kegiatan gizi spesifik tidak dilaksanakan karena refocusing anggaran kesehatan. Namun, para pendukung agen pelaksana seperti petugas gizi di Puskesmas dan bidan desa adalah aktor kunci dalam pelaksanaan jadwal tindakan integrasi stunting. Untuk beradaptasi dengan situasi ini, kunjungan rumah dan janji temu dilakukan untuk menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas. Diperlukan peraturan teknis sebagai kelanjutan dari Peraturan Bupati Malang No. 33 Tahun 2018 untuk mengakomodasi penanganan stunting melalui intervensi gizi spesifik secara optimal selama masa pandemi. Penelitian yang dilaksanakan oleh Friska, E., & Andriani, H. (2022) menunjukkan kebijakan sudah berjalan tetapi intervensi gizi sensitif belum maksimal, komunikasi dilakukan secara virtual, sumber daya yang tersedia cukup, ada pedoman kebijakan yang diketahui dan dipahami oleh pelaksana kebijakan, namun koordinasi belum optimal, lingkungan ekonomi dan sosial kurang mendukung, dan lingkungan politik cukup mendukung kebijakan. Implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting selama pandemi COVID-19 belum berjalan optimal. Oleh karena itu, implementasi konvergensi masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan kegiatan secara terkoordinasi antar lembaga. Sosialisasi di masyarakat terus ditingkatkan agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Diperlukan penyesuaian kebijakan dengan Peraturan Presiden terbaru mengenai percepatan penurunan stunting. Penelitian yang dilaksanakan oleh Nuramalia, S., Dedi, A., & Yuliani, D. (2022) menunjukkan Implementasi kebijakan pencegahan stunting oleh Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan menurut Agustino (2016:137), hal ini dikarenakan masih adanya beberapa status stunting seperti masih adanya balita kurang gizi yang disebabkan kurangnya pemerintah desa dalam memberikan perhatian dengan memberikan dukungan anggaran dan kebijakan yang jelas kepada petugas pelaksana dalam melakukan pencegahan stunting sehingga petugas kesulitan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Begitupula dengan observasi yang dilakukan diketahui bahwa Implementasi kebijakan pencegahan stunting belum optimal mengingat kurangnya program yang jelas dari pemerintah desa mengenai pencegahan stunting dan kurangnya dukungan anggaran yang diberikan kepada masyarakat serta jarangnyanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini kader kepada masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait dengan pencegahan stunting. Penelitian yang dilaksanakan oleh Wididiati, P., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2022) menunjukkan implementasi kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Lombok Timur dengan lokus desa Lenek Duren telah berjalan dengan baik dalam pelaksanaan program dan pendanaannya. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini yaitu kapasitas SDM dan kualitas kader, komunikasi, disposisi, kapasitas kebijakan dalam membangun proses implementasi serta terdapat variabel lingkungannya. Peneliti menyarankan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM, membangun komunikasi, dan membangun infrastruktur yang memadai bagi masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh Rahmasari, S. A., & Wicaksono, I. (2022) menunjukkan implementasi kebijakan penanganan stunting di kabupaten Jember saat ini

sudah memiliki ukuran dan tujuan kebijakan yang sesuai dan terlaksana dengan baik, sumber dana dan sikap pemerintah pun dirasa sudah mendukung proses percepatan penurunan stunting ini, oleh karena itu proses implementasi dari kebijakan yang dibuat Pemerintah Kabupsten Jember dalam melaksn upaya percepatan penurunan stunting untuk mencapai target dari SDGs sudah mampu terimplementasikan dengan baik.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk mengetahui dan menggambarkan faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. dan untuk mengetahui dan menggambarkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam menentukan informan dalam penelitian ini, peneliti berpedoman kepada pemilihan secara *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, dengan instrumen peneliti nya adalah pedoman wawancara. Teori yang digunakan adalah Teori Edward III.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, untuk mengetahui dan menggambarkan faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten. dan untuk mengetahui dan menggambarkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

3.1. Implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

3.1.1 Komunikasi

Analisis terhadap data yang memenuhi indikator transmisi bisa dijelaskan jika indikator ini cukup terpenuhi pada kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sehingga kebijakan ini harus terus dioptimalisasikan, sehingga terus meningkatnya penyaluran komunikasi di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Berdasarkan hasil observasi peneliti mendapatkan informasi terkait transmisi kebijakan dan implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, melibatkan berbagai langkah dan mekanisme untuk memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara efektif (Oktaviani et al,2022). Kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan dapat berjalan secara efektif, sehingga dapat menurunkan prevalensi *stunting* dan meningkatkan kualitas hidup anak-anak di wilayah tersebut. Kemudian, indikator yang memberikan pengaruh dimensi komunikasi yaitu kejelasan. Ketika mengimplementasikan kebijakan penanggulangan *stunting* yang memberikan kemudahan masyarakat untuk bisa menyalurkan komunikasi

dengan maksimal, dibutuhkan kejelasan ketika menyampaikan komunikasi. Analisis berkaitan dengan informasi yang memenuhi indikator kejelasan bisa dipaparkan jika indikator ini sudah terpenuhi pada implementasi budaya organisasi dalam memberikan peningkatan kualitas pelayanan publik untuk menanggulangi *stunting*. Tetapi, aparatur pelayanan di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan harus dapat dioptimalisasikan, sehingga meminimalisir kesenjangan informasi dalam menyampaikan informasi bisa diatasi. Indikator berikutnya yang memberikan pengaruh dimensi komunikasi yaitu konsistensi. Konsistensi merupakan tetap dan tidak mengalami perubahan taat asas, berkesinambungan dan sejalan. Analisis berkaitan dengan informasi yang digunakan untuk memenuhi indikator konsistensi sudah bisa dipenuhi serta sejalan dengan studi dokumentasi dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sesuai dengan hasil wawancara maka konsistensi menjalankan tanggung jawab pekerjaan yang diserahkan sudah diimplementasikan oleh Dinas Kesehatan Tangerang Selatan serta menjadi budaya kerja yang digunakan oleh Dinkes untuk memberikan dukungan terhadap keberhasilan.

3.1.2 Disposisi

Disposisi adalah perintah yang diberikan secara tertulis yang menjadi tindak lanjut aktivitas atau nonkegiatan pada surat asli. Disposisi memberikan pengaruh proses penerapan, indikator pada disposisi yang bisa menentukan implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* yaitu indikator sikap (Kriswanto & Fitriyadi,2020). Untuk memberikan pengaruh setiap pegawai maka perlu dilaksanakan strategi berkaitan dengan sikap. Strategi yang dilaksanakan yaitu dengan melakukan dorongan supaya pegawai dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. sikap sangat mempengaruhi hasil kinerja. Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sikap memberikan pengaruh yang sangat besar bagi keberhasilan pelaksanaan kebijakan *stunting*. Sesuai dengan hasil observasi semua aspek ini telah diimplementasikan dengan baik, disposisi kebijakan implementasi penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan dapat dikatakan sudah jelas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya penanggulangan *stunting* berjalan efektif dan berkelanjutan.

3.1.3 Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan sebuah unsur yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pimpinan di sebuah organisasi, baik organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta. Hal ini disebabkan sumber daya manusia adalah kunci utama dalam pengelolaan sebuah manajemen dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu, sumber daya manusia dalam sebuah organisasi bukan hanya diperhatikan dari banyaknya jumlah sumber daya manusia, namun juga diperhatikan dari kualitas yang dimiliki oleh masing-masing sumber daya manusia yang ada (Setiawan,2016). Sumber daya juga membantu keberhasilan kebijakan penanggulangan *stunting*. Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang ada membuat kebijakan dapat terlaksana dengan baik. Setiap pegawai mempunyai peran masing-masing sehingga peran tersebut diharapkan bisa membantu keberhasilan pelaksanaan kebijakan (Arsjad,2018). Sesuai dengan hasil observasi dapat diketahui jika sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, melibatkan berbagai aspek yang mencakup sumber daya manusia, finansial, material, dan informasi.

3.2. Faktor penghambat implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Struktur birokrasi adalah tatanan pada organisasi yang akan melaksanakan tanggung jawab dan fungsi suatu organisasi. Pada struktur birokrasi ini anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Tangerang Selatan masih belum cukup untuk menanggulangi *stunting* karena target yang hendak dicapai cukup tinggi (Katharina,2021). Faktor penghambat kebijakan yang dilaksanakan berkaitan dengan penanggulangan *stunting* yaitu anggaran. Anggaran yang ada masih belum tersedia sehingga kebijakan penanggulangan *stunting* belum sepenuhnya berhasil. Di bawah ini adalah Alokasi Anggaran Penanggulangan *Stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten:

Tabel 3.1

Alokasi Anggaran Penanggulangan *Stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten

| No | Jenis Bantuan | Jumlah |
|---------------|---|-------------------------|
| 1 | Suplementasi Vitamin dan Mineral | Rp 500.000.000 |
| 2 | Pemberian Makanan Tambahan (PMT) | Rp 300.000.000 |
| 3 | Pelatihan Tenaga Kesehatan dan Kader Posyandu | Rp 200.000.000 |
| 4 | Kampanye Publik dan Penyuluhan | Rp 150.000.000 |
| 5 | Operasional Kegiatan Lapangan | Rp 150.000.000 |
| Jumlah | | Rp 2.200.000.000 |

Sumber : Dinas Kesehatan Tangerang Selatan (2024)

3.3. Upaya yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Lampung Tengah dalam membantu KWT menghadapi hambatan hambatan tersebut

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yaitu adalah dengan meningkatkan ketersediaan anggaran. upaya yang dilaksanakan adalah dengan meningkatkan ketersediaan anggaran. Ketersediaan anggaran ini dilaksanakan supaya setiap kebijakan penanggulangan *stunting* bisa dilaksanakan dengan baik.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan oleh Saufi (2021) sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, melibatkan berbagai aspek yang mencakup sumber daya manusia, finansial, material, dan informasi. Berikut adalah rincian sumber daya yang diperlukan Tenaga Kesehatan yaitu dokter, bidan, perawat, dan ahli gizi yang terlatih dalam penanganan dan pencegahan *stunting*. Kader yang dilatih khusus untuk mendukung program penanggulangan *stunting* di tingkat komunitas. Pekerja sosial yang membantu dalam intervensi berbasis komunitas dan penyuluhan. Staf administrasi dan logistik yang mendukung operasional program,

Alokasi dana dari APBD untuk mendanai program-program penanggulangan stunting. Dukungan Finansial Eksternal: Hibah atau bantuan dari pemerintah pusat, lembaga donor, dan organisasi non-pemerintah. Kontribusi dari sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Klinik, puskesmas, dan posyandu yang dilengkapi dengan peralatan medis dan non-medis. Makanan tambahan bergizi, suplemen vitamin, dan mineral untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak. Akses ke air bersih, sanitasi yang baik, dan fasilitas kebersihan yang memadai. Sumber Daya Informasi dan Edukasi Buku panduan, pamflet, poster, dan materi lainnya yang digunakan untuk edukasi masyarakat tentang stunting. Program penyuluhan melalui media massa, media sosial, dan kegiatan komunitas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya gizi dan kesehatan ibu dan anak. Program pelatihan untuk tenaga kesehatan, kader posyandu, dan anggota masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan stunting.

IV. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Kebijakan yang ditetapkan untuk menanggulangi *stunting* di Tangerang Selatan dituliskan dengan jelas dan ditetapkan sejalan dengan kebijakan yang ada. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan mampu melaksanakan sikap yang tepat untuk menanggulangi *stunting*. Dinas Kesehatan Tangerang Selatan dapat bekerja sama untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam menanggulangi *stunting*. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Kurangnya anggaran sehingga kebijakan belum dapat terlaksana dengan maksimal. Upaya untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi kebijakan penanggulangan *stunting* di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten yaitu meningkatkan ketersediaan anggaran dengan bekerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dikarenakan proses penelitian hanya berlangsung 2 (dua) minggu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Peneliti menyadari masih terbatasnya temuan yang peneliti temukan, oleh karena itu agar dapat dilakukan penelitian lanjutan di lokasi serupa untuk menambah rekomendasi dan mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan baru yang dikhawatirkan akan muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Tangerang Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustino, H., & Widodo, E. R. P. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Sosial Pencegahan Stunting di Kabupaten Malang. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(2), 241-252.

Arsjad, M. F. (2018). Peranan aparat desa dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di desa karyamukti kecamatan mootilango kabupaten gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, 1(1), 16-32.

- Bedasari, H., Novita, F., Sambuardi, R., & Safitri, P. (2021). Implementasi kebijakan cegah stunting di Desa Sepedas Kelurahan Pasir Panjang Kabupaten Karimun. *Jurnal Awam*, 1(2), 45-50.
- Friska, E., & Andriani, H. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(5), 586-592.
- Katharina, R. (2021). *Pelayanan publik & pemerintahan digital Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kinanti, A., & Yusran, R. (2022). Implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan stunting berbasis nagari di Nagari Kajai Pasaman Barat. *Journal of Civic Education*, 5(3), 293-300.
- Kriswanto, E. A., & Fitriyadi, F. (2020). Implementasi Digital Signature Untuk Validasi Disposisi Surat. *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 9(1), 11-22.
- Maulana, I. N. H., Sholihah, Q., & Wike, W. (2022). Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Spesifik sebagai Upaya Penanganan Stunting di Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 136-144.
- OKTAVIANI, P., Jumiayati, J., Kusdalinah, K., Okfrianti, Y., & Simanjuntak, B. Y. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 (Doctoral dissertation, Poltekkes Kemenkes Bengkulu).
- Rahmasari, S. A., & Wicaksono, I. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Jember Dalam Upaya Percepatan Pencapaian Target Sustainable Development Goals. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(1).
- Saufi, A. (2021, August). Dinamika collaborative governance dalam penanggulangan stunting ditengah pandemi covid-19. In *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan* (Vol. 1, No. 1).
- Setiawan, R. I. (2016). Pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata: perspektif potensi wisata daerah berkembang. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 1(1), 23-35.
- Shauma, N. U., & Purbaningrum, D. G. (2022). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 200-207.
- Wididiati, P., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Di Desa Lenek Duren Kecamatan Lenek). *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(4), 379-394.

Wiguna, A. R., Meigawati, D., & Amirulloh, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial*, 6(1), 28-37.

